

**IMPLEMENTASI PENERIMA MANFAAT BANTUAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DIBIDANG KESEJAHTERAAN
SOSIAL TAHUN 2020 DI DESA TAMBIREJO
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN**

Ani Setyowati¹, Teguh Imam R²

Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

ABSTRACT

Social welfare is the goal of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of the Government's efforts to achieve social welfare is to make a policy, namely the Family Hope Program (PKH), which in its implementation still often experiences problems such as a discrepancy between the amount of assistance that should be given and the income that should be given by beneficiary families (KPM), the existence of credit cards. the family hope program (PKH) is exchanged with the beneficiary family (KPM), the data for the name of the beneficiary family hope program (PKH) is not the same as the KTP population. The purpose of this study was to determine the implementation of the beneficiaries of the Family Hope program in the field of social welfare in Tambirejo Village, and the factors that influence it.

The research approach used is descriptive qualitative using the snow ball method by taking 1 key informant, namely a PKH assistant officer named Ribut Wulan Wahyuni, if there are still deficiencies related to the information obtained, the key informant will provide recommendations to those who feel they have more information. valid by conducting direct interviews using several guid interview guides based on the focus/phenomena studied including Communication, Human Resources, Disposition and Bureaucratic Structure.

The results of the study indicate that the implementation of the beneficiaries of the Family Hope Program in Tambirejo Village is still inadequate compared to the conditions of the region and the number of participants in the Family Hope Program in Tambirejo Village, in terms of communication between implementers which is still lacking, and outreach to the community about the Family Hope program has not yet been implemented. maximum so that people do not know fully about this program.

Keywords: Implementation, Family Hope Program (PKH).

ABSTRAK

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah untuk mencapai kesejahteraan sosial adalah dengan membuat kebijakan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang dalam implementasinya masih sering mengalami masalah seperti adanya ketidak sesuaian antara jumlah bantuan yang seharusnya diberikan dengan penerimaan

yang semestinya diberikan oleh keluarga penerima manfaat (KPM), adanya kartu program keluarga harapan (PKH) ketukar dengan keluarga penerima manfaat (KPM), data nama penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dengan kependudukan KTP. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Edward III yaitu Komunikasi, Sumberdaya Manusia, Disposisi, Struktur Birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penerima manfaat bantuan program keluarga harapan dibidang Kesejahteraan sosial di Desa Tambirejo, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode snow ball dengan mengambil 1 informan kunci yaitu petugas pendamping PKH dengan nama Ribut Wulan Wahyuni, bila masih terdapat kekurangan berkaitan dengan informasi yang di dapat, informan kunci akan memberikan rekomendasi kepada yang dirasa memiliki informasi yang lebih valid dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan menggunakan beberapa panduan interview guid yang didasarkan pada fokus/fenomena yang diteliti meliputi Komunikasi, Sumberdaya Manusia, Disposisi dan Struktur birokrasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Tambirejo masih belum memadai dibanding dengan kondisi wilayah dan jumlah peserta program keluarga harapan di Desa Tambirejo, dari segi komunikasi antar pelaksana yang masih kurang, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program keluarga harapan belum

maksimal sehingga masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang program ini.

Rekomendasi: Petugas Pendamping PKH: supaya memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas dan lansia terkait kegiatan bantuan PKH; Desa memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas

Kata kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH).

A. Pendahuluan

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu masalah utama yang ditandai oleh besarnya jumlah penduduk miskin, pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Tingginya angka penduduk miskin akan menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya manusia oleh karena itu harus dilakukan penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Perkembangan kemiskinan di Indonesia khususnya di Jawa Tengah jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 mengalami peningkatan, dalam usaha penanggulangan kemiskinan Kementerian Sosial RI memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) keseluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Grobogan. Penduduk miskin di Kabupaten Gobogan pada tahun 2020 mengalami peningkatan salah satunya bertempat tinggal di Desa Tambirejo.

Desa Tambirejo merupakan penduduk yang didominasi sebagai petani, kerja serabutan dan hanya sebagian kecil yang mempunyai tempat usaha seperti agen

sembako, ternak ayam kampung, ternak sapi dan bisnis pulsa. Dengan begitu pemerintahan daerah juga melihat Desa Tambirejo ini masih terdapat masyarakat miskin yang bahkan sangat miskin, maka dari itu pemerintah memberi kebijakan untuk memilih Desa Tambirejo jadi salah satu yang menerima bantuan bersyarat tersebut. Berkaitan dengan Program Keluarga Harapan, maka peneliti tertarik untuk memfokuskan pada bidang kesejahteraan sosial.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dibidang kesejahteraan sosial diharapkan dapat sesuai dengan tujuan dari program PKH yaitu untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari Keluarga Miskin (KM).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penerima manfaat bantuan program keluarga harapan dibidang Kesejahteraan sosial di Desa Tambirejo, dan faktor- faktor yang mempengaruhinya.

A. Tinjauan Teori

Alma (2007:3) mengemukakan bahwa, " Administrasi merupakan himpunan catatan-catatan mengenai perusahaan dan peristiwa-peristiwa perusahaan untuk keperluan pimpinan dan penyelenggaraan perusahaan''.

Berdasarkan kesimpulannya diatas, Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan.

Oleh karena itu, implementasi melahirkan suatu kebijakan-kebijakan dalam melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Program Keluarga Harapan atau disebut juga PKH adalah program bantuan sosial bersyarat bagi Keluarga Miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) memungkinkan keluarga miskin khususnya ibu hamil dan anak-anak, untuk menggunakan layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia di sekitarnya. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) juga didorong untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tetap menjaga tingkat perlindungan sosialnya.

Berdasarkan pemaparan diatas dalam penelitian ini penulis akan meneliti Implementasi Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dengan menggunakan

teori George C. Edward III yang didalamnya terdapat empat faktor implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa penulis melihat komunikasi antara Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan masyarakat Penerima Manfaat (PM) kurang optimal, masih ada masyarakat yang seharusnya tidak menerima lagi dalam artian ekonomi sudah membaik tetapi masih tetap menerima bantuan tersebut. Dari permasalahan tersebut kemungkinan karena kurangnya sosialisasi pemerintah terkait Program Keluarga Harapan (PKH) serta proses pembaruan data yang tidak berkala.

1) Komunikasi meliputi:

- a. Transmisi ialah penyampaian komunikasi bertujuan agar tidak ada miskomunikasi antara Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- b. Kejelasan adalah penyampaian komunikasi yang disampaikan mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalah pahaman masyarakat dalam menerima informasi tersebut.
- c. Konsisten ialah pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten agar mudah dijalankan.

Penulis melihat bahwa dalam melakukan kegiatan.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tambirejo Kecamatan Toroh. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa penulis melihat sumber daya manusia di Desa Tambirejo belum memadai

dibanding dengan kondisi wilayah dan jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tambirejo, masih ada masyarakat yang mengeluh karena banyaknya peserta yang layak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) tapi tidak terdata sebagai penerima PKH.

1) Sumber daya meliputi:

- a. Sumber daya yang utama dalam implementasi program adalah sumber daya manusianya (staf). Hasil pemantauan penulis dilapangan bahwasanya jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tambirejo sangat minim dibandingkan dengan peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang begitu banyak sehingga beberapa peserta Penerima Manfaat yang penulis temui kurang mendapatkan informasi seputar Program Keluarga Harapan (PKH).
- b. Informasi, Berdasarkan temuan penulis dilapangan bahwa ketika ada informasi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) langsung menginformasikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- c. Wewenang, berdasarkan pemantauan penulis bahwa petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai hak apabila ada permasalahan yang dialami oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- d. Fasilitas, Berdasarkan temuan penulis dilapangan bahwa tidak ada fasilitas yang

diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dibidang kesejahteraan sosial.

2) Disposisi

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa penulis melihat Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Petugas Dinas Sosial sudah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Desa Tambirejo. Tetapi masih ada masyarakat yang kurang paham terkait program ini dan tidak sadar bahwa dia sudah bisa membiayai kebutuhannya sendiri dan malah bergantung pada Program Keluarga Harapan (PKH) ini.

1) Disposisi meliputi:

- a. Efek Disposisi, berdasarkan pantauan penulis bahwa Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi, menurut pantauan penulis dilapangan bahwa tidak ada pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas dan lansia.
- c. Insentif, Hasil observasi dilapangan bahwa insentif memang perlu untuk ditambahkan karena pekerjaan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) membutuhkan waktu yang ekstra dan tanggung jawab yang besar.

2. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa penulis melihat pelaksanaan struktur birokrasi dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tambirejo belum optimal. Masyarakat Penerima Manfaat (PM) di Desa Tambirejo belum mematuhi prosedur atau

aturan yang berlaku dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan masih ada masyarakat yang terlambat dalam mengumpulkan persyaratan yang telah ditentukan.

1) Struktur birokrasi meliputi:

a. Standar Operating Procedure (SOP, berdasarkan pantauan penulis bahwa Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sudah melaksanakan tugasnya berdasarkan prosedur.

b. Fragmentasi, hasil dari penelitian dilapangkan bahwa penulis melihat bahwa hanya ada beberapa pengawas Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjun ke masyarakat untuk melakukan survai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penulis melakukan penelitian dengan menggunakan konsep/kerangka pikir dari Edward III terkait adanya Program Keluarga Harapan (PKH)

B. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yang menggambarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Lokus penelitian ini dilakukan di Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *SNOW BALL* (bola menggelinding). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tambirejo Kecamatan Toroh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III yang menggunakan empat indikator dalam implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Teori ini dianggap paling sesuai untuk digunakan dalam menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tambirejo melalui WA grub yang bertujuan agar dapat dengan mudah di respon secara jelas oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memiliki ponsel dilakukan dengan cara *getok tular* (penyebaran informasi dari mulut ke mulut) karena penerima manfaat pada umumnya sudah lanjut usia.

b. Sumber Daya

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk jumlah staf sangat minim hanya dilakukan satu pendamping perlu adanya penambahan staf karena dalam menjalankan kegiatan membutuhkan waktu yang ekstra, petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menjalankan kegiatan dibantu oleh ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertugas membantu petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) apabila ingin mencari rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga perlu adanya penambahan staf.

c. Disposisi

Pada tahun 2020 pencairan bantuan program keluarga harapan disalurkan secara non tunai. Dalam proses pembuatan ATM penyandang disabilitas dan lansia ikut datang di bank meskipun disabilitas tidak bisa berjalan dan lansia yang sudah rentang.

d. Struktur Birokrasi

Petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sudah melaksanakan tugasnya dengan melakukan survai ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), setelah penulis melakukan penelitian, penulis melihat masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum bisa terbuka kepada Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) ketika di tanya aset yang di miliki.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dibidang Kesejahteraan Sosial Di Desa Tambirejo Kecamatan Toroh

Faktor Pendukung

1. Komunikasi

a. Transmisi

Bahwa dalam penyampaian sosialisasi melalui pesan singkat berbentuk WA grub, bagi KPM yang tidak mempunyai HP dilakukan secara *getok tular* (penyebaran informasi dari mulut ke mulut).

b. Kejelasan

Petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menyampaikan pesan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah diterima jelas oleh penerima manfaat terkait dengan uang bantuan PKH

digunakan untuk kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

c. Konsisten

Dalam pertemuan kelompok sudah konsisten dilakukan setiap bulan sekali, bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhalangan hadir maka dikasih tahu tetangga terdekatnya.

2. Sumber Daya Manusia

a. Staf

Petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menjalankan kegiatan dibantu oleh ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PKH), setiap Dusun ada ketua kelomponya yang membantu petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) apabila ingin mencari rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

b. Informasi

Petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bila ada informasi yang terupdate terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) langsung memberitahukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pesan grub WA atau *getok tular* (penyebaran informasi dari mulut ke mulut).

c. Wewenang

Petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

d. Fasilitas

Dalam menjalankan tugas, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mendapatkan fasilitas dari

kemensos sehingga memperlancar petugas dalam menjalankan kegiatannya.

3. Disposisi

a. Efek Disposisi

Dalam proses pembuatan ATM penyandang disabilitas dan lansia juga ikut datang di bank meskipun disabilitas tidak bisa berjalan dan lansia yang sudah rentang.

b. Melakukan Pengaturan Birokrasi

Sudah ada penanganan dari tenaga kesehatan apabila penyandang disabilitas ataupun lansia mempunyai penyakit seperti penyakit kulit.

c. Insentif

Petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sudah merasa cukup dengan insentif yang di terima.

4. Struktur Birokrasi

a. Membuat Standar Operating Procedures (SOP)

Dalam menjalankan kegiatan Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan prosedurnya, dalam pencairan dana sudah sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

b. Melaksanakan Fragmentasi

Petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sudah melaksanakan tugasnya dengan melakukan survai ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Faktor Penghambat

1. Komunikasi

a. Transmisi

Dalam penyampaian sosialisasi tidak ada hambatan bagi Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melakukan sosialisasi dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

b. Kejelasan

Masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menggunakan uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membayar hutang.

c. Konsisten

Dalam pertemuan kelompok ada absensinya tetapi masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak hadir sehingga petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mendatangi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Staf

Terlalu minimnya staf pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menjalankan kegiatan perlu adanya penambahan.

b. Informasi

Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tidak ada permasalahan dalam penyampaian informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

c. Wewenang

Apabila Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tidak memiliki kewenangan akan mengakibatkan permasalahan tidak cepat selesai karena harus menunggu arahan dari pusat.

d. Fasilitas

Apabila tidak mendapatkan fasilitas dari Kemensos, Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tidak bisa menjalankan kegiatannya dengan lancar.

3. Disposisi

a. Efek disposisi

Belum ada pelayanan khusus terkait pembuatan rekening bagi penyandang disabilitas dan lansia.

b. Melakukan Pengaturan Birokrasi

Belum ada perawatan kesehatan bagi penyandang disabilitas dan lansia yang sudah rentang.

c. Insentif

Petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sudah merasa cukup dengan insentif yang diterimanya.

4. Struktur Birokrasi

a. Membuat Standar Operating Procedures (SOP)

Tidak ada penghambat pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melakukan kegiatan, dalam proses pencairan dana juga sudah sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

b. Melaksanakan Fragmentasi

Masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum bisa terbuka kepada Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) ketika Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan survai ke rumah Keluarga Penerima Manfaat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa Implementasi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dibidang kesejahteraan sosial Tahun 2020 di Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, secara umum sudah berjalan baik namun belum optimal. Masih adanya aspek yang belum tercapai maksimal.

Hasil penelitian penulis dilapangan adapun faktor pendorong pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan prosedurnya dan adanya penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung Program Keluarga Harapan (PKH) serta mendapatkan dukungan dari Kemensos.

Faktor yang menjadi penghambat yaitu masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak berangkat dalam melakukan pertemuan kelompok padahal pertemuan kelompok itu sifatnya wajib bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih belum terbuka kepada Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terkait aset yang di miliki seperti, perhiasan yang berlebihan dan memiliki kendaraan lebih dari satu.

DAFTAR PUSTAKA

- A Friedlender, Walter. 1961. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Buchari Alma. 2007. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Alfabeta, Bandung.

- Agus Erwan Purwono dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media, .
- Airkunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Durham, Arthurt. 1965, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo,
- Edward III, George C, 1980. *Menerapkan Kebijakan Publik*. Washington: Pers Triwulanan Kongres.
- Friedrich, Carl J. 1969. *Man and His Goverment*. Newyork: McGraw-Hill.
- Grindle, Merille S.(ed). 1980. *Politik dan Implementasi Kebijakan di Ketiga Dunia*. New Jersey: Princeton University Press.
- Guntur Setiawan, 2002. *Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Hanifah Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya.
- Hainz Eulau dan Kenneth Prewitt. 1973. *Labyrinths Of Democracy*. Indianapolis: Boobs Merrill.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salema Humanika.
- Hoogwood, Brian W and Lewis A. Gunn. 1990. *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press.
- Jones, C. O. 1984. *Pengantar Kajian Kebijakan Publik*. Monterey, CA: Perusahaan Penerbitan Brooks/cole.

- Mazmanian, Daniel H, dan Sabatier, Paul. A. 1983. *Implementasi dan Publik Kebijakan*. New York: Harpers Collins.
- Muhaimin, dkk, 2009. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Pressman, J.L dan Aaron Wildavsky. 1973. *Implementasi: Betapa Hebat Ekspektasi*. Washington Bersandar di Oakland London: California.
- Priyatno, Dwi. 2006 *Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet kedua.
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Suparlan, 2006. *Guru Sebagai Profesi*. (Yogyakarta: Hikayat Publishing).
- Suharto Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Siagian Sondong. P. 2006. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Askara.
- Syafiie, Nawawi. 2006. *Sistem Administrasi Publik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Van Metter, Donald. A dan Van Horn, Carl. E. 1975. *Implementasi Kebijakan Proses*. AS: Publikasi Sage.Inc.
- Wijayanti, D dan Heri Wahono, 2005. *Analisis Konsentrasi Kemiskinan Di Indonesia Periode Tahun 1999-2003*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 215-225.

Wilensy dan Lebeaux. 2006. *Pengantar Ilmu Sosial*.
Bogor: Al Azhar, hlm 7. Wickedden. 2006. *Enam
Karakteristik dalam Kesejahteraan Sosial*.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan.
Undang-undang No. 11 Tahun 2009
Kementrian Sosial. 2019. *Pedoman Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan*.

